

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Reformasi dibidang keuangan negara mengalami perubahan yang signifikan ditandai dengan akuntansi pemerintah yang mulai memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan Indonesia yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (PP No. 71 Tahun 2010).

Laporan keuangan merupakan media sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010). Seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, perubahan laporan keuangan dari basis kas ke basis akrual memang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan bagi para penggunanya. Untuk itu pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sudah menerapkan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi, salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun

pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas" (Simanjuntak, 2010).

Penerapan akuntansi berbasis akrual harus diterapkan secara hati-hati mengingat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual baru diterbitkan dan belum diimplementasikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, kondisi diatas bagaimanapun akan memungkinkan timbulnya kesulitan dalam penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual, bagi kalangan yang baru menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual, peralihan ini menuntut waktu untuk memahaminya (Sumardi, 2008). Ada sedikit bukti tentang manfaat yang terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, sementara akademisi telah meremehkan pentingnya akuntansi akrual di sektor publik (Lapsley, 2009). Namun, banyak penelitian telah menganjurkan superioritas akuntansi berbasis akrual dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas sehingga alasan mengapa banyak organisasi sektor publik internasional telah mengadopsi atau sedang dalam proses menerapkan prinsip akuntansi akrual (Connolly and Hyndman, 2006).

Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Tickell, 2010). Kementerian Dirjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi menyatakan bahwa hambatan yang akan dialami adalah sulitnya pola pikir staf atau pejabat pengelola keuangan, kerumitan, dan beragamnya transaksi keuangan yang dicatat secara akrual, jumlah tenaga pelatih di pemerintahan yang mampu mendidik akuntansi akrual terbatas serta membutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk mengembangkan sistem yang handal.

Usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menerapkan sistem berbasis akrual, Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar bimbingan dan

lokakarya pengembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Sehingga Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual disamping itu pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dan cara pengimputan data berbasis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Deaconu (2009) manfaat utama akuntansi akrual meliputi, kinerja yang lebih baik, komparabilitas, proses pengambilan keputusan yang lebih baik, akuntabilitas yang lebih baik dan pengendalian yang lebih efisien. Akuntansi akrual membantu memperbaiki keputusan manajer, memberikan biaya dan aktivitas layanan yang lebih transparan dan meningkatkan akuntabilitas manajer (Karbasi, Yazdi and Tarighi (2010). Menurut Jones dan Pendlebury (2000), akuntansi keuangan adalah teknik keuangan akuntan secara alami telah mendapat perhatian oleh fungsi pelayanan khusus. Laporan keuangan menghasilkan gambaran penelitian yang dipercaya. Bagaimana penelitian itu bekerja dalam setahun, dan dalam bentuk apa penelitian itu berlangsung sekarang. Tekanan selalu menuai pertanyaan mengenai penghasilan dan pengeluaran, neraca dan arus kas nantinya.

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan 4 macam opini yaitu: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (Disclaimer atau TMP). Ketika Badan pemeriksa memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini berarti laporan keuangan yang dilaporkan sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat

dipercaya, dan dapat dibandingkan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christianti (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat), menarik kesimpulan bahwa akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Munasyir (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara, menarik kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Lodhrakentjana, 2012).

Lodhrakentjana (2012) dengan judul penelitian Motivasi, Kepuasan Kerja, Komitmen Pegawai Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Depok, menarik kesimpulan bahwa motivasi, kepuasan kerja dan komitmen berhubungan positif dan berpengaruh signifikan dengan kualitas laporan keuangan. Jumiartini (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bole Balango (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bole Balango), menarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Atikah (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu), menarik kesimpulan bahwa kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Agustiawan (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Moderasi, menarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis

akrual dan Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Kiranayanti (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menarik kesimpulan bahwa kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Susilawati (2014) dengan judul penelitian Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menarik kesimpulan bahwa Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dan Sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Sutawan (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Stres Kerja, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Di Kabupaten Buleleng), menarik kesimpulan bahwa Stress kerja, motivasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Herawati (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur), menarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas terlihat ada keterkaitan antara variable independen akuntansi berbais akrual dan sistem pengendalian intern yang sejajar untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu sistem pemerintahan yang menghasilkan data yang lebih akurat untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan salah satu tujuan sistem pengendalian intern adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sistem akuntansi, resiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencataan atau perhitungan dapat

dimanipulasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah mengalami kekeliruan. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin menganalisa penerapan akuntansi akrual, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan pada salah satu SKPD yang baru dibentuk. Apakah masalah diatas dapat muncul dalam salah satu SKPD yang baru dibentuk.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN” (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara).

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara ?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual pada kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan. Selain itu, penelitian

ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

Dan juga bermanfaat untuk memberikan informasi tentang kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara bagi pihak-pihak yang membutuhkan analisis atau kinerja keuangan tersebut.